



RENJA

2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Center
Telp/Fax. (0778) 470620 Website:<https://bakesbangpolbatam18@gmail.com>



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

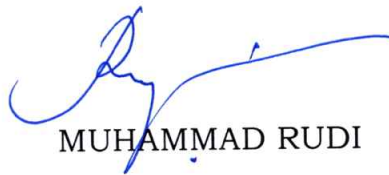
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1440

KATA PENGANTAR

Renja 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Renja 2025 juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategi yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan system penganggarannya.

Pada Ranhir Renja 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai 6 (enam) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran **Rp. 102.275.866.575.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 7

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 49

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 49

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 50

3.3 Program dan Kegiatan 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

BAB V PENUTUP..... 76

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KOTA BATAM	12
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM	26
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025	33
TABEL 2.4	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025	48
TABEL 3.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	55
TABEL 4.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH 3

GAMBAR 1.2 KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA 4

GAMBAR 1.3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja 2025 Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada umumnya. Kualitas penyusunan Rancangan Renja perangkat daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan yang akan diberikan pada publik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Adanya keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra perangkat daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Batam sebagai tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

Dalam Penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2025 mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2025 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

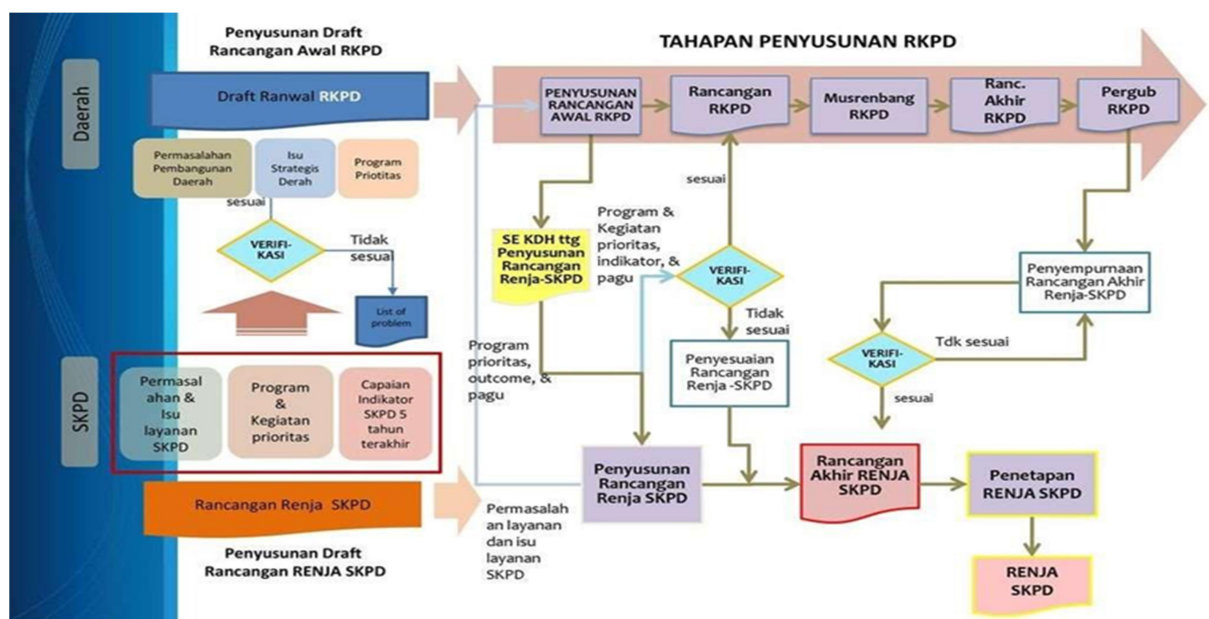
Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara RPJMD Kota Batam dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi Kota Batam tahun 2021-2026 “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”.
2. Misi Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
 - b. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
 - c. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
 - d. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
 - e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

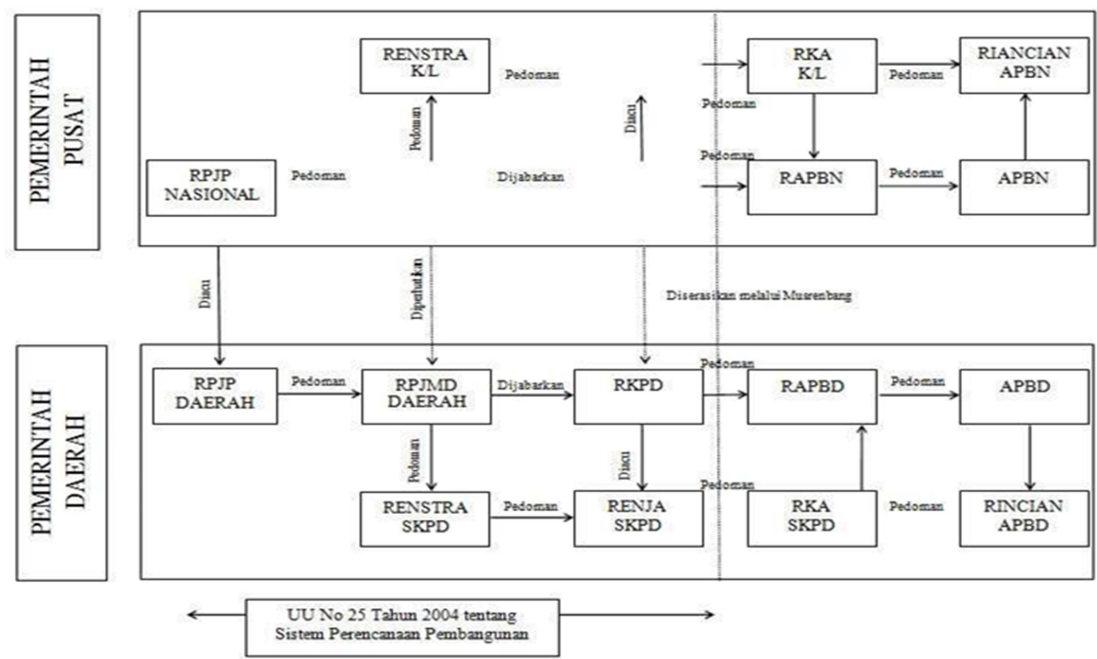
Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan tim penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun Anggaran 2025;
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2023, pengendalian kegiatan 2023 dan Ranwal RKPD 2025);
2. Penyusunan Rancangan Awal
 - Koordinasi dengan bidang, pejabat fungsional perencana;
 - Desk dengan pengampu kegiatan;
3. Penyusunan Rancangan

- Sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bakesbangpol Tahun Anggaran 2025;
4. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Mengikuti Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah yang melibatkan antara lain : DPRD, Perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan yang terkait.
5. Perumusan Rancangan Akhir
- Penyempurnaan oleh Tim
 - Verifikasi oleh Mitra Perangkat Daerah;
 - Penetapan Renja

Rencana Kerja disusun dengan mengakomodir usulan-usulan rencana kegiatan yang disampaikan dari Kepala bidang dan sekretaris selaras dengan program-program yang telah di susun dalam Renstra. Selain itu, usulan dari masyarakat dan instansi vertikal juga diakomodir sesuai dengan program prioritas kepala daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2

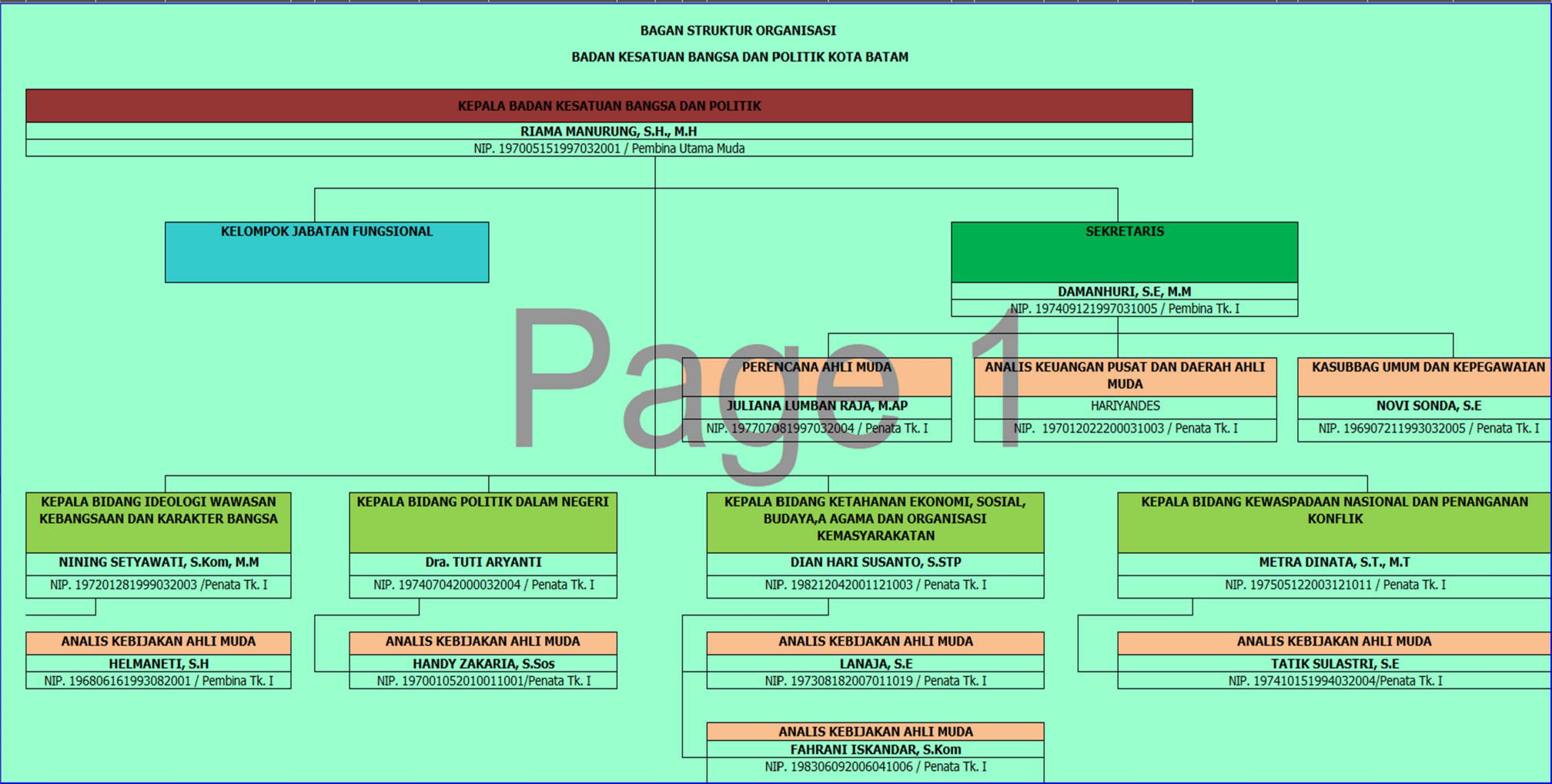
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang politik;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, sebagai berikut :



Gambar 1.3
Bagan Struktur Organisasi

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2).
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54).
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127);
 15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1076)

16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1149);
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423);

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam menyusun Rancangan Renja Tahun 2025 ini dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan RKPD Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapainya tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan Sub kegiatan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program / kegiatan.

Capaian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total anggaran yang dianggarkan **Rp. 50.578.421.247** untuk realisasi anggaran sebesar **Rp. 48.843.929.097.-** dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam. Secara pencapaian target dan presentasi realisasi anggaran untuk laporan keuangan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 96.57% fisik yaitu : 99.06% .

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
BADAN KESBANGPOL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	57 %	57 %
8	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57 %	57 %
8	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	100%	35 orang/bulan	35 orang/bulan	100%	39 orang/bulan	39 orang/bulan	100%
8	01	01	2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	-
6	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	-	-	-	-	-	-	-
6	01	01	1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	114 paket	-	-	-	-	38 Paket	-	-
6	01	01	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang	-	-	-	-	6 orang	1 Orang	4.2 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	57 %	57 %
8	01	01	2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	17%
8	01	01	2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	5 Paket	3 Paket	12%
8	01	01	2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
8	01	01	2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	1 Paket	10 %
8	01	01	2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-
8	01	01	2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	6 Laporan	10 %
8	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	01	2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	2 unit	14 Unit	14 Unit	100%	16 Unit	-	-
8	01	01	2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	6 unit	22 Unit	22 Unit	100%	20 Unit	-	-
8	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50 %
8	01	01	2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	10 %
8	01	01	2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	10 %
8	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Daerah	100%	100%	100%	85%	85%	100%	34 %	34 %
8	01	01	2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100 %
8	01	01	2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan.	5 Unit	2 Unit	5 Unit	4 Unit	60 %	5 Unit	3 Unit	60 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	01	2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	277 unit	47 unit	47 unit	35 unit	75 %	54 unit	-	-
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Perumusan Kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan “yang dilaksanakan”.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %	82 %
8	01	02	2.01.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Idelogi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %	82 %
8	01	02	2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.054 orang	364 orang	665 orang	618 orang	93 %	670 orang	300 orang	9.8 %
8	01	02	2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	860 orang	-	60 orang	60 orang	100 %	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	02	2.01.0006	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	660 keluarga	-	150 keluarga	150 keluarga	100 %	160 keluarga	160 keluarga	25 %
8	01	02	2.01.0008	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	240 orang	-	-	-	-	40 orang	40 orang	17 %
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30 %	100 %
					Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
8	01	03	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Diusulkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30 %	100 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
					Persentase peserta/ unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	85 %	100 %	100 %	85 %	100 %	85 %	80%	85 %
8	01	03	2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan.	168 orang	24 orang	204 orang	204 orang	-	-	-	-
8	01	03	2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 laporan	15 laporan	30 laporan	30 laporan	100 %	37 laporan	35 laporan	59 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4										
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/ dilaksanakan	6 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %	1 kebijakan	-	-
8	01	04	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	180 rekomendasi	30 rekomen dasi	30 rekomeda si	33 rekomen dasi	100 %	30 rekomen dasi	11 rekomen dasi	-
					Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	90 %	100 %	94 %	94 %	100 %	100 %	100 %
8	01	04	2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	1.810 orang	135 orang	2.625 orang	2.560 orang	97 %	4.200 orang	500 orang	28 %
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	6 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	100 %	1 kebijakan	1 kebijakan	17 %
					Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 %	100 %	100 %	47 %	47 %	100 %	-	-
8	01	05	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya,agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	48 %	48 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar.	63 kelurahan	5 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	100 %	15 kelurahan	-	-
8	01	05	2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kemasyarakatan	4.615 orang	640 orang	903 orang	860 orang	90 %	2.353 orang	1.018 orang	22 %
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %	97 %	100 %	97 %	97 %	100 %	14 %	14 %
					Persentase Rekomendasi FORKOPIMDA yang ditetapkan sebagai kebijakan	-	-	80 %	-	-	81 %	-	-
					Persentase Potensi konflik yang terdeteksi	100 %	100 %	80 %	61 %	81 %	80 %	51 %	51 %
8	01	06	2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Nasional	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6 %	6 %
					Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	33 konflik	18 konflik	23 konflik	26 konflik	100 %	34 konflik	12 konflik	36 %
					Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan Deteksi Dini	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	57 %	57 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	06	2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.036 orang	157 orang	994 orang	950 orang	96 %	1.258 orang	256 orang	25 %
8	01	06	2.01.0004	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.	24 Dokumen	-	18 dokumen	18 Dokumen	100 %	44 dokumen	5 dokumen	21 %

Evaluasi realisasi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA yang terdiri dari 5 kegiatan dapat

- Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi 75 % sesuai dengan target dan bulan berjalan;
- Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 57 % sudah sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan dan untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan peruundang-undangan dilakukan pergeseran anggaran ke bulan desember 2024;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terealisasi 50 % sesuai dengan target dan bulan berjalan;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terealisasi 34 % dikarenakan 1 unit kendaraan operasional akan dilakukan penghapusan aset.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER

KEBANGSAAN Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, realisasi pencapaian kinerja telah mencapai 82% untuk pelaksanaan kegiatan Pembentukan Paskibraka, Sosialisasi Penghayataan dan Pengamalan Pancasila kepada keluarga, Pelaksanaan Bela Negara dan Rapat Rutin Forum Pembauran Kebangsaan dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, dan belum teralisasi adalah hibah uang kepada Forum Pembauran Kebangsaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Realisasi pencapaian kinerja telah mencapai 100%. Pada program ini kinerja yang dihasilkan adalah pelaksanaan Pendidikan politik kepada pemilih pemula, perempuan pesisir, kaukus perempuan dan organisasi masyarakat. Pada tahun ini juga dilaksanakan hibah kepada KPU, Bawaslu dan hibah bantuan keuangan partai politik. Realisasi serapan anggaran pada program ini juga terserap 99%

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan kegiatan pada program ini yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan indikator kegiatan yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan dan persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Realisasi pencapaian kinerja untuk indikator jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan melebihi target. Target untuk tingkat kehadiran organisasi masyarakat dalam sosialisasi peraturan dan tingkat partisipasi organisasi masyarakat untuk melapor ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat baik. Namun hibah uang kepada organisasi masyarakat tidak dapat direalisasikan 100%, hal tersebut disebabkan organisasi tidak dapat melengkapi dokumen sesuai Peraturan Walikota Batam tentang hibah.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pada program ini pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan indikator kegiatan jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan dan Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif. Realisasi pencapaian target kinerja untuk kelurahan bersinar terealisasi 100% (7 Kelurahan) sesuai dengan anggaran yang tersedia. Untuk indikator kegiatan jumlah kebijakan Rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan koordinasi bidang ekonomi, sosial budaya, agama dan kemasyarakatan dapat direalisasikan 100%.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pada program ini memiliki 3 indikator yaitu:

1. Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan. Untuk indikator tersebut, realisasi capaian

kinerja 90%. Disebabkan masih adanya kebijakan yang belum dapat direalisasikan hingga 100% yaitu kebijakan hibah kepada instansi vertikal.

2. Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai Kebijakan. Untuk indikator tersebut, realisasi kinerja masih NOL. Hal ini karena belum dapat dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi FORKOPIMDA, berhubung pelaksanaan kegiatan Rapat Forkopimda Kota Batam masih dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan.
3. Persentase Potensi konflik yang terdeteksi. Untuk indikator tersebut realisasi pencapaian kinerja 100%. Hal ini karena adanya koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi vertikal dan FKDM Kota Batam dan FKDPD.

Realisasi kinerja pada Pelaksanaan kegiatan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah memiliki indikator kegiatan yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial telah terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan pemberian hibah barang kepada instansi vertikal telah dilaksanakan sesuai dengan target.
2. Indikator jumlah potensi konflik yang terdeteksi telah direalisasikan dengan 26 kasus potensi konflik yang terdeteksi, telah melampaui target sebesar 24 kasus.
3. Indikator Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini telah terealisasi sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan. Penguatan realisasi capaian berdasarkan tingkat laporan kejadian (kasus) dan kehadiran peserta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Perangkat Daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah khusus pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD sedangkan untuk analisis Kinerja Pelayanan OPD merujuk pada Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang terdiri dari :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan;
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dari kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, dapat disimpulkan pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah:

1. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas
2. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
3. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kewaspadaan Dini Perangkat Daerah (FKDPD)
4. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
5. Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
6. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan, Kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan melakukan monitoring ke lokasi organisasi masyarakat. Untuk memudahkan organisasi melaporkan organisasi atau mendaftar organisasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menggunakan aplikasi SILAPORMAS.

Fasilitasi untuk Forum Pembauran Kebangsaan dilakukan dengan memberikan hibah uang untuk meningkatkan kinerja FPK di Kota Batam. Demikian juga dengan FKDM Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi dengan pemberian hibah uang untuk meningkatkan kinerja FKDM di Kecamatan dan Kota Batam dalam melakukan deteksi dini dan pemberian informasi atau laporan bulanan.

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah fasilitasi kepada FKUB dengan memberikan hibah uang dan melakukan rapat rutin dengan FKUB untuk menghimpun informasi konflik agama maupun kepercayaan yang terjadi dan solusi penyelesaian yang telah dilakukan.

Untuk pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa tercapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif dan manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan peruntukannya.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada **Tabel 2.2 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam)**

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	tahun (n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	95	95	95	95	95	95	95	95	
2.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila		Persentase masyarakat yang terbina dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.	95%	96%	96%	97%	95%	95%	96%	96%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	tahun (n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik		Persentase masyarakat dan Partai Politik yang dibina	95%	96%	97%	97%	95%	95%	97%	97%	
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Masyarakat yang dibina		Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
5.	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong kerukunan masyarakat dan toleransi masyarakat		Persentase Penanganan Konsolidasi Kerukunan antar Agama	95%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	tahun (n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	90%	90%	90%	90%	75%	85%	90%	90%	6.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai mata dan telinga walikota, merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang melaksanakan penjabaran operasional indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021–2026 yaitu pada Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan telah melaksanakan program /kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari dinamika sosial ekonomi politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Batam pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta efek domino adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.

2. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
3. Masih munculnya konflik-konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahanan keagamaan yang salah.
4. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
5. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
6. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
7. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu akibat masih kurangnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis.
8. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
9. Pemberian hibah barang kepada instansi vertikal berupa pembangunan gedung, sehingga membutuhkan ASN yang memiliki kompetensi konstruksi bangunan dan tata ruang.
10. Masih munculnya aliran kepercayaan baru yang dapat mengurangi kondusif kerukunan hidup beragama.

Selain permasalahan tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu, adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/3037/55 tahun 2018 tentang Peningkatan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi/Kab/Kota, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dibentuk untuk mendukung terciptanya stabilitas di Kabupaten/Kota dan Provinsi, pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, mendukung kelancaran dari program peningkatan kerukunan umat beragama dan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan serta program pengembangan dan partisipasi budaya politik. Namun di dalam pelaksanaannya pada nomenklatur tugas dan fungsinya, khusus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat minimnya anggaran untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan dimaksud, hal tersebut berdampak terhadap pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

terhadap capaian program sesuai dengan salah satu prioritas yang terdapat di program RPJMD Kota Batam Tahun 2016–2021 yaitu : ***Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai – nilai Keagamaan dan Kebangsaan, dan Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik***. Dengan demikian sasaran dan target dari perencanaan RPJMD dan Renstra yang sudah di usulkan belum tercapai maksimal.

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan strategi pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan, karakter kebangsaan dan nasionalisme.
2. Melakukan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kota Batam.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.
4. Melakukan sosialisasi Pendidikan politik terkait etika politik demokrasi terutama kepada pemilih pemula, kaum wanita dan masyarakat.
5. Koordinasi dan Kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangkaantisipasi isu negative yang berkembang menjelang Pemilu dan Pemilukada.
6. Perlu adanya langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sesuai dengan capaian indikator Renstra 2021–2026.
7. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir program-program kegiatan yang ada di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk menunjang kinerja forum-forum yang ada seperti : PPWK, FPK, FKUB, POA, PKS, FORKOPIMDA, FKDM, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Batam.
8. Pemberian hibah uang kepada organisasi masyarakat dan hibah barang kepada instansi vertikal.

9. Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Hal tersebut selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu Reformasi Birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat interaktif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan di Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan, dalam rancangan ini di harapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. **Review terhadap rancangan renja dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dibawah ini :**

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Kota Batam				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Kota Batam				
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				28.575.169.793	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				102.275.866.575	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9.139.223.878	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.282.023.170	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	100 %	8.268.526.145	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	100 %	8.724.429.870	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	8.192.861.662	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	8.724.429.870	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75.664.483	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	0	Sub kegiatan disatukan sub gaji
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100.000.000			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %		

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	66.180.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	0	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	370.177.847	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	600.871.300	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.307.573	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	13.384.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	162.219.658	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	129.106.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.759.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	23.710.108	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	24.739.300	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.331.614	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	0	Sub kegiatan dihapuskan

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	164.608.894	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	358.883.000	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	167.970.264	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.635.302.000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	39.800.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 unit	102.872.000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	128.170.264	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 unit	340.058.000	
									Sub Kegaitan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	634.886.000	
									Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	557.486.000	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	205.190.703	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	87.230.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.430.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	187.690.703	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	84.800.000	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Daerah	100 %	127.358.919	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Daerah	100 %	168.010.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.540.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan.	2 unit	40.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan.	3 unit	49.020.000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	47 unit	43.058.919	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	75.450.000	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Perumusan Kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan “yang dilaksanakan”.	100 %	127.738.225	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Perumusan Kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan “yang dilaksanakan”.	100 %	7.276.948.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
						Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100 %				Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100 %		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Idelogi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100 %	127.738.225			Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Idelogi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100 %	7.276.948.000	
						Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 %		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 %		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	741 orang	50.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	973.450.000	
				-		-	-	-	Pembentukan Paskibra		Jumlah Paskibra	60	5.709.550.000	Penam bahan sub kegia tan baru

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
				Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	600 orang	77.738.225	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	-	0	Pagu dipindah kan ke sub kegiatan pemben tukan paskibra
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan	300 keluarga	50.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan	600 keluarga	426.690.000	
									Sub kegiatan Pembinaan lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Doku men	167.258.000	
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100 %	8.875.959.053	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100 %	6.293.271.665	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	100 %		Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	100 %				
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Diusulkan	100 %	8.875.959.053	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	100 %	6.293.271.665	
						Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %				Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %		
						Persentase peserta/ unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	85 %				Persentase peserta/ unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	85 %		

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan.	204 orang	8.508.866.072	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan.	205 orang	5.820.292.665	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	367.092.981	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daera	16 laporan	472.979.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT		Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/ dilaksanakan	1 kebijakan	3.641.911.705	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT		Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/ dilaksanakan	1 kebijakan	3.463.843.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	30 rekomen dasi	3.641.911.705	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	30 rekomen dasi	3.463.843.000	
						Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %				Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	2.618 orang	3.641.911.705	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	3.100 orang	3.463.843.000	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA		Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1 kebijakan	4.155.729.038	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA		Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1 kebijakan	5.256.786.800	
						Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 %				Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 %		

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya,agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100 %		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya,agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100 %		
						Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar.	15 kelurahan				Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar.	23 kelurahan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kemasyarakatan	2.794 orang	4.155.729.038	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kemasyarakatan	2.342 orang	5.255.786.800	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %	2.534.607.894	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan
				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 dokumen	1.534.607.894	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21 dokumen	67.869.229.940	
				Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di daerah.	.	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di daerah yang disusun	287 orang	1.000.000.000	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di daerah.	.	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di daerah yang disusun	864 orang	834.764.000	

2.4.1. Membandingkan Rancangan Awal dengan Analisis Kebutuhan

Sehubungan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 menerangkan bahwa:

1. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Peraturan tersebut melanjutkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ada penambahan sub kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan indikator jumlah Paskibraka dan target capaian kinerja sejumlah 60 orang dan sub kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka dengan indikator Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan target capaian 1 Laporan, Sehingga pagu pada sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dipindahkan ke sub kegiatan pembentukan paskibraka.
2. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan disatukan dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dihapuskan.
3. Belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintahan dan/instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintah umum, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

4. Dalam lampiran huruf G.40 pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program dan kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai T.A 2022-2025 pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri.
5. Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada dua penambahan sub kegiatan, yang pertama adalah sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan target capaian adalah 1 (satu) unit, yang kedua adalah sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan target capaian adalah 1 (satu) unit. Penambahan sub kegiatan tersebut untuk menunjang program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dengan dasar aturan tersebut diatas, maka proses analisis kebutuhan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam T.A.2024 melakukan koordinasi dengan instansi-vertikal terkait yaitu BAWASLU, KPU, Marinir, Pengadilan Negeri Batam, Polresta, Sat Polair, BINDA, sehingga pagu pada rancangan awal RKPD T.A.2025 sebesar Rp. 28.625.169.793,- mengalami peningkatan kebutuhan anggaran yang sangat signifikan dari rancangan awal Rencana Kerja 2025 menjadi Rp. 102.275.866.575,- Berikut Analisa kebutuhan pagu T.A. 2025:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Penambahan pagu disebabkan pagu kegiatan Paskibra dan Duta Pancasila. Pagu akhir anggaran di program ini sebesar sebesar **Rp. 7.276.948.000,-**

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dalam sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Penambahan pagu anggaran disebabkan kegiatan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pagu akhir anggaran di program ini sebesar **Rp. 8.875.959.053,-**
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dalam sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pagu akhir anggaran di program ini sebesar **Rp. 2.534.607.894,-**
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga mengalami kenaikan pagu, hal ini dipengaruhi dengan adanya penambahan pegawai dari 39 orang menjadi 45 orang, usulan Pengadaan Barang Milik Daerah yaitu belanja kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 unit dan usulan belanja penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu SPPD ke luar kota. Hal ini sehubungan dengan rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pemilu. Sehingga pagu akhir di program tersebut sebesar **Rp. 9.139.223.878,-**
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya juga mengalami kenaikan pagu ini dipengaruhi oleh target kegiatan pada jumlah kelurahan yang memiliki satgas kelurahan bersinar dari 15 kelurahan menjadi 23 kelurahan ini mengakibatkan kenaikan pagu menjadi **Rp. 5.255.786.800,**

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kesbangpol Kota Batam untuk tahun 2025 tidak mendapatkan usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025
KOTA BATAM

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara struktural di bawah Direktorat Jenderal Politik dan pemerintahan Umum kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Kerukunan umat beragama di daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah;
4. Penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
6. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;
7. Pendidikan politik dan Penguatan ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik;
8. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah;
9. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
12. Peningkatan efektivitas Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah Badan Kesbangpol Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa menuju Masyarakat yang adil dan sejahtera dengan mengoptimalkan keberadaan FKUB serta memanfaatkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik.
4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
5. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila.
6. Optimalnya penanganan potensi konflik SARA.

Program dan kegiatan Tahun 2021-2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan dapat di implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Dalam program prioritas atau unggulan daerah sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tidak terdapat didalam program tersebut diatas dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Pelayanan Fungsi Unsur Pemerintahan Umum.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, disepakati sebanyak 6 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rincian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka
- Sub Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
- Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							(Tahun Rencana)					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		Kota Batam				APBD			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				102.275.866.575					29.636.896.980
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	11.282.023.170			100 %		9.593.086.153
8	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan		100 %	8.724.429.870			100 %		8.608.713.086
8	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 orang/bulan	8.724.429.870			47 orang/bulan		8.530.256.584
8	01	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	75.664.483			12 dokumen		78.456.502
8	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	66.180.000			100 %		66.170.000
8	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		38 paket	-			38 paket		39.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 orang	66.180.000			6 orang	27.170.000
8	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	600.871.300			100 %	399.213.996
8	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 paket	13.384.000			1 paket	14.835.522
8	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	129.106.000			5 Paket	168.205.563
8	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	74.759.000			-	-
8	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	24.739.300			2 paket	24.585.011
8	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	-			1 dokumen	5.528.351
8	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	358.883.000			12 laporan	186.059.549

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	1.635.302.000			100 %	174.168.367
8	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		26 unit	102.872.000			16 unit	41.268.620
8	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		32 unit	340.058.000			20 unit	72.899.747
8	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %			100 %	212.762.240
8	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	2.430.000			12 laporan	18.145.750
8	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	84.800.000			12 laporan	194.616.490
8	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Daerah		100 %	100 %			100 %	132.058.464
8	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	43.540.0000			1 unit	45.816.202

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan.		3 unit	49.020.000			5 unit	42.441.605
8	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 unit	75.450.000			51 unit	43.800.657
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Perumusan Kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan “yang dilaksanakan”.		100 %	7.276.948.000			100 %	184.545.599
						Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya		100 %				100 %	
8	01	02	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Idelogi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti		100 %	7.276.948.000			100 %	184.545.599
						Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter kebangsaan		100 %				100 %	
8	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		250 orang	0			250 orang	34.545.599

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
8	01	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 orang	973.450.000			680 orang	50.000.000
8	01	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan		600 keluarga	426.690.000			180 keluarga	50.000.000
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		60 orang	5.709.550.000			60 orang	50.000.000
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 laporan	167.258.000			1 laporan	96.398.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan		100 %	6.293.271.665			100 %	8.893.421.261
						Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		100 %				100 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan		100 %	6.293.271.665			100 %	8.893.421.261
						Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		100 %				100 %	
						Persentase peserta/ unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya		85 %				85 %	
8	01	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan.		205 orang	5.820.292.665			30 orang	8.512.268.619
8	01	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		16 laporan	472.979.000			15 laporan	381.152.642

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/ dilaksanakan		1 kebijakan	3.463.843.000			1 kebijakan	3.781.396.923
8	01	04	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan		30 rekomen dasi	3.463.843.000			30 rekomen dasi	3.781.396.923
						Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100 %				100 %	
8	01	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		3.100 orang	3.463.843.000			375 orang	3.781.396.923
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan		1 kebijakan	5.255.786.800			1 kebijakan	4.314.893.460
						Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif		100 %				100 %	
8	01	05	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Ekonomi, sosial budaya, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti		100 %	5.255.786.800			100 %	4.314.893.460

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar		15 kelurahan				13 kelurahan	
8	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kemasyarakatan		2.342 orang	5.255.786.800			1.000 orang	4.314.893.460
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan		100 %	68.703.993.940			100 %	2.869.553.584
						Persentase Rekomendasi FORKOPIMDA yang ditetapkan sebagai kebijakan		81 %				81 %	
						Persentase Potensi konflik yang terdeteksi		80 %				80 %	
8	01	06	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Nasional	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100 %	68.703.993.940			100 %	2.869.553.584

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi		34 konflik				34 konflik	
						Persentase Masyarakat (peserta bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan deteksi dini		75 %				75 %	
8	01	06	2.01	0002	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun		864 orang	834.764.000			287 orang	869.553.584
8	01	06	2.01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		21 dokumen	67.869.229.940			6 dokumen	2.000.000.000

Sehubungan dengan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yaitu pada pembahasan poin 5 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, angka 6 huruf b dinyatakan bahwa Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau hibah instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.

Terhadap Pemerintah Kota Batam, hal ini berdampak pada dialihkannya seluruh rencana alokasi dana hibah instansi vertikal Tahun 2023 yang semula di SKPD Teknis dialihkan kepada SKPD Urusan Pemerintahan Umum dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kegiatan tersebut antara lain adalah: Pembangunan jalan Kantor Binda Kepri, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Polda Kepri, dan Pembangunan Sarana Penerangan Fasilitas Umum Mako Polda Kepri.

Dengan peralihan dana Hibah vertikal tersebut ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka menambah 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10.3/376 perihal Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pasal 22 Bahwa Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan urusan Pemerintahan Umum, sehingga Program PASKIBRA yang semula berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada tahun 2023.

Dengan peralihan Program/kegiatan PASKIBRA dan kegiatan Hibah Vertikal ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kebutuhan pendanaan untuk program dan kegiatan pada Renja Kerja (Renja) 2025 diperlukan penambahan pagu anggaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keberhasilan rencana kerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai.

Terlampir rincian Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator ProgramKegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			102.275.866.575,00					
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			102.275.866.575,00					
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			102.275.866.575,00					
437	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	11.282.023.170,00					
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.724.429.870,00			-	-	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.724.429.870,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	66.180.000,00			-	-	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	66.180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	600.871.300,00			-	-	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.384.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	129.106.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.759.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.739.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	358.883.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.635.302.000,00			-	-	
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	634.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	557.486.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	102.872.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	340.058.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	87.230.000,00		-	-	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.010.000,00		-	-	

	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	49.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	75.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
438	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	7.276.948.000,00				
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	7.276.948.000,00			-	-
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	973.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	600 Keluarga	426.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka							
						Jumlah Paskibraka	60 Orang	5.709.550.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila							
						Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	167.258.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
439	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	-	-	6.293.271.665,00				

						PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	6.293.271.665,00			-	-	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	205 Orang	5.820.292.665,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi								

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Laporan	472.979.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
440	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	3.463.843.000,00					
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	3.463.843.000,00			-	-	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3100 Orang	3.463.843.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

441	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	5.255.786.800,00					
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	5.255.786.800,00			-	-	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2342 Orang	5.255.786.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan ,Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
442	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	68.703.993.940,00					

	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	68.703.993.940,00						
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik									
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	67.869.229.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	864 Orang	834.764.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							J U M L A H	102.275.866.575,00							

BAB V

PENUTUP

Dengan penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan, pada bab ini memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Sesuai tugas pokok dan fungsi program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang nomenklatur nya banyak terkait tentang sosialisasi, dialog, rapat koordinasi baik kepada stakeholder Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Forum – forum FKUB, FPK, FKDM, PPWK, Pembauran, Partai Politik, Paguyuban, Ormas dan Aparatur ASN Pemerintah Kota Batam, kiranya diperlukannya dukungan dari segi penganggaran sesuai target indikatif Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2023 yang mengacu pada kinerja RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- b. Kondisi Geografis Kota Batam yang Heterogen, dengan keberagaman budaya, etnis, suku dan Agama, sangat di perlukan suatu kegiatan yang mendukung agar terciptanya kondusifitas di Kota Batam.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat kebijakan program/kegiatan,
- b. Mempedomani urusan yang telah diatur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan urusan konkuren Pemerintah Daerah dan berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

3. Rencana tindaklanjut yang perlu diperhatikan perumusan program dan kegiatan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2024 sudah mengacu pada target indikator kinerja RPJMD 2021–2026, Renstra OPD2021–2026.

Akhirnya Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah di susun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu tahun 2025. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, rencana kerja ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI